

KONSUMEN DAN PANDEMI COVID-19
Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa
Transportasi Travel



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA

C100170270

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSUMEN DAN PANDEMI COVID-19

**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi
Travel)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA

C100170270

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

KONSUMEN DAN PANDEMI COVID-19

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Travel)

OLEH

MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA

C100170270

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Kamis, 17 Juni 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juni 2021

Penulis



MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA

C100170270

KONSUMEN DAN PANDEMI COVID-19

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Travel)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19. Dimana pelaku usaha transportasi travel dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu di masa pandemi covid-19, pelaku usaha transportasi travel harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Maka dalam penelitian ini akan disajikan perbandingan antara kondisi penyelenggaraan travel di masa pandemi Covid-19 dengan norma yang mengaturnya. Melalui kategorisasi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, akan diperoleh travel mana saja yang sudah sesuai dengan peraturan dan memberikan perlindungan hukum serta tidak melanggar hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi travel.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, transportasi, travel, covid-19

Abstract

This study aims to describe how legal protection is for consumers who use travel transportation services during the Covid-19 pandemic. Where travel transportation business actors in running their business must pay attention to consumer rights as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, during the Covid-19 pandemic, travel transportation business actors must comply with the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). So in this study, a comparison will be presented between the conditions of travel arrangements during the Covid-19 pandemic and the norms that govern it. Through the categorization that has been adjusted to the laws and regulations that govern it, it will be obtained which travel is in accordance with the regulations and provides legal protection and does not violate the rights of consumers who use travel transportation services.

Keywords: consumer protection, transportation, travel, covid-19

1. PENDAHULUAN

Transportasi atau pengangkutan merupakan hal penting yang berperan dalam pembangunan nasional. Pentingnya sarana transportasi yang memadai ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan jasa pengangkutan, baik bagi mobilitas

barang maupun mobilitas orang untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi atau angkutan pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Secara sederhana transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dari segi kepemilikannya, transportasi atau angkutan dibagi menjadi dua, yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum.

Angkutan umum berperan penting bagi masyarakat untuk mobilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang taraf ekonominya di kalangan menengah ke bawah karena golongan masyarakat tersebut jarang yang memiliki kendaraan pribadi dan tarif yang dipatok oleh angkutan umum dapat dijangkau masyarakat. Salah satu jenis transportasi umum yang digunakan masyarakat adalah transportasi travel, karena dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat akan menghindari transportasi umum dengan jumlah kapasitas yang banyak, dan pilihan masyarakat biasanya jatuh pada transportasi travel. Pengertian kendaraan travel adalah layanan transportasi angkutan darat yang menghubungkan antar kota atau antar provinsi dengan layanan premium yang menggunakan sistem point to point (outlet ke outlet) atau door to door (antar jemput ke alamat tujuan).

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, sudah menjadi kewajiban pelaku usaha dalam hal ini yaitu pelaku usaha transportasi travel untuk menyediakan angkutan yang tidak hanya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari segi kendaraan saja, tetapi juga dari segi protokol kesehatan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama khususnya penumpang sebagai konsumen agar terhindar dari resiko penularan covid-19 dalam menggunakan transportasi travel. Hal ini sejalan dengan Pasal 138 ayat (1) UULLAJ yang secara tegas menyatakan "*Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.*" Oleh karena itu penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi travel harus dilindungi hak-haknya sebagai konsumen agar tercipta perlindungan konsumen

yang baik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*"

Demi mewujudkan hal tersebut, di masa pandemi covid-19 pemerintah melalui menteri perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kebijakan pedoman tersebut dikeluarkan oleh menteri perhubungan untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 di dalam penggunaan transportasi umum. Setiap pelaku usaha transportasi tak terkecuali pelaku usaha transportasi travel wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut demi terciptanya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi covid-19 yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19?

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana penulis uraikan diatas, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19, (2) Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis dan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19.

2. METODE

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan non doktrinal yang kualitatif, karena hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, melainkan hukum juga memiliki hubungan dengan lembaga sosial lainnya yang termanifestasi dari aksi dan interaksi masyarakat. Dalam penelitian ini akan mencoba melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor eksternal

hukum yang terkait dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat usaha transportasi travel yang terletak di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi Covid-19. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan dan penjelasan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu, pelaku usaha transportasi atau pengelola agen travel dan penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi travel. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen tertulis dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga yang terkait yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan (observasi). Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. (Ishaq, 2017) Data yang diperoleh akan diaplikasikan atau diterapkan kedalam norma-norma yang terkait dalam penelitian, sehingga akan terjadi perbandingan antara data dengan norma.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa tiga (3) data yang digunakan oleh penulis dari beberapa usaha travel yang ada di Kota Surakarta yaitu Joglosemar Travel, Kencana Travel dan Persada Travel. Pembahasan yang akan diuraikan ini mengenai penyelenggaraan transportasi travel di masa pandemi covid-19 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum, antara lain:

Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat persiapan perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “a. menjual tiket secara daring (online) serta

menjamin penerapan jaga jarak fisik (physical distancing)” Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan “*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*”. Yang dimaksud dengan physical distancing menurut oleh Ahmad Yurianto yaitu kegiatan memutus rantai penularan di masyarakat, dengan cara jaga jarak secara fisik dan jaga jarak dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya dengan jarak lebih dari 1 meter (Widyaningrum, 2020). Dari tiga (3) travel yang diteliti, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat persiapan perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*b. menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan*” Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Menurut Rismana disinfektan yaitu bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya (Chuares, 2020). Berdasarkan tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat persiapan perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*c. memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh,*

dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (hand sanitizer)." Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dari data travel yang diteliti, masih terdapat travel yang belum menjalankan ketentuan ini, yaitu Joglosemar Travel. Hal tersebut karena Joglosemar Travel tidak memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang dan tidak menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, sedangkan dua travel lain yaitu Kencana Travel dan Persada Travel telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini.

Pada saat perjalanan, operator sarana transportasi wajib memenuhi Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyatakan "*a. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) selama perjalanan secara ketat dan periodik.*" Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan "*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*". Dari tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan kategori dalam ketentuan ini.

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat selama perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan "*b. menyediakan penyanitasi tangan (hand sanitizer) untuk penumpang*" Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hand Sanitizer menurut Retnosari dan Isdiartuti merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.

Hand sanitizer sendiri terdiri dari handsanitizer spray dan handsanitizer gel. (Khasanah, 2021). Berdasarkan tiga (3) travel yang diteliti penulis, semuanya telah menyediakan *handsanitizer* untuk penumpang selama perjalanan di dalam kendaraan travel. Oleh karena itu ketiganya telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Menurut Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*c. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker*” Dan dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Masker menurut Cohen & Birdner adalah alat perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya (Wulandari, 2021). Dari tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan kategori dalam ketentuan ini.

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat selama perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*d. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi*” Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Pasal 6 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*e. menyiapkan kontak keadaan darurat (emergency call) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan.* Sedangkan dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan konsumen juga mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Berdasarkan tiga (3) travel yang diteliti oleh penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat selama perjalanan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*f. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), petugas harus: 1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan; 2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan 3. berkoordinasi dengan pusat krisis Corona Virus Disease 2019 (crisis center COVID-19)*” Serta dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dari tiga (3) travel yang diteliti oleh penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat sampai tujuan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan “*a. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan.*” Selain itu, konsumen pengguna jasa transportasi travel juga mempunyai hak atas kenyamanan,

keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) travel yang diteliti penulis, semua travel tersebut tidak melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan travel yang telah tiba di tujuan. Artinya keseluruhan travel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat sampai tujuan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan *b. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan*, dan dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga pengguna jasa transportasi travel mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dari tiga (3) travel tersebut, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi pada saat sampai tujuan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan *“c. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh.”* Selain itu, konsumen pengguna jasa transportasi travel juga mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, operator sarana transportasi di masa pandemi covid-19 harus memenuhi ketentuan *“d.*

dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis.” Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dari tiga (3) travel yang diteliti penulis, keseluruhan travel tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam kategori ini.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis sebelumnya terhadap tiga (3) travel yaitu Joglosemar Travel, Kencana Travel dan Persada Travel diperoleh kesimpulan yakni: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi travel di masa pandemi covid-19 yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebanyak sembilan (9) kategori, yaitu kategori menjual tiket secara daring (online) serta menjamin jaga jarak fisik (*physical distancing*), kategori mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*phsycal distancing*) selama perjalanan secara ketat dan periodik, kategori menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*) untuk penumpang, kategori memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker selama perjalanan, kategori menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan, kategori dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, petugas harus: 1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan; 2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan 3. berkoordinasi dengan pusat krisis *Corona Virus Disease 2019 (crisis center COVID-19)*, kategori memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan pada saat sampai tujuan, kategori mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh, dan kategori dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada saat sampai tujuan, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis.

Sedangkan sebanyak empat (4) kategori lain, yaitu kategori menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan pada saat perisapan perjalanan, menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan pada saat persiapan perjalanan, kategori memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), kategori mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi dan kategori melakukan sterilisasi armada transportasi (*penyemprotan disinfektan*) setelah sampai di tujuan tidak dipenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Bagi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi travel di masa pandemi covid-19 dan bersikap tegas agar ketentuan penyelenggaraan transportasi di masa pandemi covid-19 selalu dijalankan oleh pelaku usaha demi terciptanya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa transportasi travel yang lebih baik.

Bagi pelaku usaha transportasi travel di masa pandemi covid-19 agar selalu memperhatikan dan menjalankan aturan-aturan tentang transportasi di masa pandemi covid-19 yang berlaku. Jika penyelenggaraan transportasi travel di masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka konsumen sebagai pengguna jasa transportasi travel juga akan mendapatkan rasa aman, nyaman dan selamat dalam menggunakan jasa transportasi travel serta terhindar dari resiko penularan covid-19 dalam menggunakan jasa transportasi travel.

Bagi masyarakat khususnya konsumen jasa transportasi travel di masa pandemi covid-19 harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi travel yang ada dan agar selalu memperhatikan

hak-haknya sebagai konsumen agar tidak ada hak konsumen yang dirugikan dalam menggunakan jasa transportasi travel di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq. (2017). *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta
- Rusdiansyah, Muhammad Fauzi, Njatrijani, Rinitami dan Mahmudah, Siti. (2016). "Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat (Angkot) Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4*.
- Astri, I Gusti Agung Ayu Laksmi & Suartha, I Dewa Made. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat," *Journal Kertha Semaya, Volume 6 Nomor 6*.
- Khasanah, Kharismatul dkk. (2021). "Edukasi Dan Evaluasi Tingkat Pengetahuan Warga Sekitar Masjid Di Daerah Pekalongan Barat Mengenai Penggunaan Handsanitizer Guna Pencegahan Covid-19," *Jurnal ABDIMAS, Vol. 2 No. 1*.
- Wulandari, Devi Fitria. Dkk. (2021). "Sosialisasi Cara Pemakaian Masker Dan Hand Sanitizer Yang Baik Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Rumah Pintar komplek Griya Asri Pamulang, Blok E 9 No.7, Kecamatan Setu, Kelurahan Bhakti Jaya," *Jurnal Lokabmas Kreatif, Vol. 02 No. 01 (Maret, 2021)*
- Widyaningrum, Nrangwesthi dkk. (2020). "Gambaran Penerapan Physical Distancing Sebagai Upaya Menekan Persebaran Covid-19 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 7 No. 2 (2020)*
- Chuarez, Fiza Ishlahiyya, dkk. (2020). "Pembuatan Dan Penyemprotan Disinfektan: Kegiatan KKN Edisi Covid-19 Di Desa Bringi Malang," *Sinergi: Jurnal Pengabdian, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2020)*